

## Pendampingan Eksternal RA Baitul Hidayah dalam Mempersiapkan Kelayakan Akreditasi

Henny<sup>1\*</sup>, Marwah<sup>1</sup>, Hartati<sup>1</sup>, Kadar Risman<sup>1</sup>, Siti Misra Susanti<sup>1</sup>, La Jeti<sup>1</sup>, Delvi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Correspondence: [heni88buton@gmail.com](mailto:heni88buton@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this activity is to provide understanding by assisting and facilitating PAUD institution managers, school principals and early childhood education teachers in preparation for the fulfillment of the National Education Standards (SNP) as a benchmark and reference for the feasibility level of services and programs of an PAUD institution in achieving gradual, planned, and competitive service quality. The results of this PKm activity are 1) improvement of RA Baitul Hidayah's governance system, especially in formal service programs; 2) Provide understanding to principals and teachers about documents to achieve national education standards; 3) Opening the teacher's insight related to accreditation assessment which is carried out systematically and comprehensively through internal and external evaluation activities to determine the feasibility and performance of RA Baitul Hidayah.*

**Keywords:** Accreditation; External Assistance; RA Baitul Hidayah

### ABSTRAK

*Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dengan mendampingi serta memfasilitasi pengelola lembaga PAUD, kepala sekolah dan guru-guru pendidikan anak usia dini akan persiapan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai tolak ukur dan acuan tingkat kelayakan layanan maupun program suatu lembaga PAUD dalam mencapai mutu layanan secara bertahap, terencana, dan kompetitif. Hasil dari kegiatan PKm ini adalah 1) peningkatan sistem tata kelola RA Baitul Hidayah khususnya pada program layanan formal; 2) Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru tentang dokumen-dokumen untuk mencapai standar nasional pendidikan; 3) Membuka wawasan guru terkait dengan penilaian akreditasi yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan eksternal untuk menentukan kelayakan maupun kinerja RA Baitul Hidayah.*

**Keywords:** Akreditasi; Pendampingan Eksternal; RA Baitul Hidayah

Copyright © 2022 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## 1. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu parameter indeks pembangunan masyarakat. UUD 1945 juga menekankan pentingnya pendidikan nasional yang bersifat mencerdaskan kehidupan masyarakat serta memenuhi standar kelayakan. Pendidikan yang memenuhi kriteria kelayakan harus dapat diakses secara penuh oleh masyarakat di Indonesia. Pendidikan 4.0 adalah pendidikan yang menekankan pada kreativitas dan inovasi (Sermsirikarnjana et al., 2017). Berbagai laporan hasil penelitian di luar negeri menyimpulkan bahwa dunia pendidikan Indonesia dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju dunia.

Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan berbasis inovasi semakin menguatkan bahwa sistem pendidikan nasional kita membutuhkan revisi dan perbaikan yang masif, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil-hasil pengukuran dan evaluasi terkait sistem pendidikan nasional, maka ditetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam menilai mutu lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menetapkan regulasi terkait mutu pendidikan dan mewajibkan akreditasi bagi seluruh institusi dan level pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini dan non-formal, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Implementasi dari kebijakan tersebut direalisasikan dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional yang menangani akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (Wijoyo, 2020). Seiring dengan inovasi disruptif yang berkembang dan kebijakan pemerintah terkait kelayakan pendidikan nasional, maka implementasi standar mutu dan akreditasi pendidikan dalam masyarakat Indonesia menarik untuk dikaji dan ditelaah secara komprehensif.

Untuk meningkatkan generasi yang siap akan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu kompetitif pada semua program layanan secara bebas pada tahun-tahun mendatang diperlukan lembaga/satuan pendidikan yang layak berkompetisi dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk sebagai standar kelayakan suatu program/lembaga berdasar pada Standar Nasional Pendidikan (Lt & Fatmawati, 2006).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003) memberikan penjelasan tentang akreditasi yang merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program pada suatu lembaga pendidikan berdasar pada kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Yudiawan, 2019, menjelaskan bahwa akreditasi suatu lembaga merupakan bentuk akuntabel publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap satuan pendidikan. Olehnya itu, status akreditasi suatu lembaga maupun program pendidikan merupakan hal yang mutlak dan secara legalisasi maupun brand bahwasanya suatu lembaga tersebut dikelola secara professional dengan mutu yang terjamin.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara terbatas dengan kepala RA Baitul Hidayah, dan guru-guru mengemukakan bahwa beberapa lembaga-lembaga di Kota Bau-bau masih kurang memahami dokumen-dokumen terkait dengan Standar Nasional Pendidikan hubungannya dengan pemenuhan kelengkapan akreditasi sebagai standar kelayakan suatu lembaga untuk di visitasi pada tahun 2021.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah *social participatory* yakni guru-guru dan akademisi sama-sama berpartisipasi melakukan kegiatan untuk memahami dan menambah wawasan mengenai administrasi kelayakan suatu lembaga untuk dapat diakreditasi (Wahyuni & Putra, 2020). Kegiatan PK ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah dengan beberapa tahapan, sebagai berikut: **Pertama**, komunikasi kegiatan pengabdian dengan pimpinan sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan pengabdian di lapangan. **Kedua**, komunikasi kegiatan pengabdian dengan pihak yayasan dan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di lembaga yang dijadikan tempat pengabdian. **Ketiga**, Mendampingi dan mengedukasi guru-guru dan kepala sekolah tentang 8 Standar Pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU Sisdiknas tahun 2003 sebagai standar yang harus diterapkan suatu lembaga pendidikan. **Keempat**, Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut.

Sasaran pelaksanaan kegiatan PKM ini yakni kepala sekolah dan guru-guru di RA Baitul Hidayah kota Baubau yang berjumlah 4 orang. Adapun latar belakang pendidikan guru adalah pendidikan agama islam sehingga pengetahuan akan kompetensi maupun administrasi PAUD hanya berdasarkan pelatihan-pelatihan berkala yang di adakan oleh pemerintah/dinas terkait. Pengetahuan tersebut sangat minim didapatkan mengingat pelaksanaan kegiatan terkadang terdapat berbagai kendala. Oleh karena itu, melalui kegiatan PKM ini dapat membantu satu sama lain untuk menjadi lembaga yang memiliki mutu dimasa-masa yang akan datang.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Komunikasi Kegiatan Pengabdian dengan Pimpinan

Raudhatul Athfal (RA) Baitul Hidayah kota Baubau menjadi salah satu lembaga yang dijadikan sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan dengan pimpinan untuk mengkomunikasikan kegiatan pengabdian yang dilakukan serta persiapan-persiapan dokumen yang harus disiapkan sebelum ke lapangan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan memberikan masukan untuk mengurus dokumen pelaksanaan pengabdian pada lembaga LP2M untuk diberikan penugasan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### 3.2 Komunikasi Kegiatan Pengabdian dengan Yayasan dan Kepala Sekolah

Berdasarkan pada penugasan dari LP2M terkait dengan pengabdian yang dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengkomunikasikan kegiatan pengabdian kepada ketua Yayasan Baitul Hidayah dan kepala sekolah RA Baitul Hidayah sebagai tindakan permohonan izin dan penyamaan persepsi kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kegiatan ini sekaligus memberikan penyampaian awal terkait dengan persiapan semua dokumen yang ada dan pernah di buat selama proses penyelenggaraan layanan pendidikan hubungannya dengan dokumen-dokumen untuk kelayakan akreditasi baik persyaratan khusus berupa surat permohonan satuan yang diakreditasi, izin operasinal lembaga, jumlah peserta didik, dan sertifikat kompetensi guru serta Kurikulum Satuan untuk pengajuan akreditasi (Indrawan, 2020). Dokumen-dokumen persyaratan umum yang harus di lengkapi untuk memenuhi kelayakan suatu lembaga dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) berdasar pada dokumen-dokumen 8 Standar Nasioan Pendidikan (SNP). Adapun hasil dari kegiatan ini adalah ketua yayasan dan kepala sekolah menyambut baik kegiatan pengabdian yang dilakukan dan merasa terbantu akan adanya program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di RA Baitul Hidayah. Menurut Raya, 2018 mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam untuk keefektifan dan keefisienan dalam suatu pelaksanaan kegiatan.



**Gambar 1.** Foto komunikasi yayasan dan kepala sekolah terkait dengan pengabdian yang dilakukan

### 3.3 Mendampingi dan Mengedukasi Guru-guru tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai Dokumen Kelayakan Akreditasi

Kegiatan mendampingi dan mengedukasi guru-guru terkait dengan dokumen standar nasional merupakan tahapan inti dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang merupakan bentuk kepedulian para akademisi/dosen PG PAUD UM Buton terhadap lembaga pendidikan untuk mencapai mutu lembaga yang optimal pada masa-masa mendatang. Pendampingan sekaligus edukasi yang dilakukan kepada guru-guru tersebut dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Buton. Tujuan kegiatan ini adalah mendampingi dan mengedukasi guru-guru dan kepala sekolah tentang 8 Standar Pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU Sisdiknas Tahun 2003 sebagai standar yang harus diterapkan suatu lembaga pendidikan. Selain itu, pendampingan ini dilakukan agar guru-guru maupun penyelenggara pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang SNP dan administrasi-administrasi yang harus disiapkan selama proses penyelenggaraan pendidikan agar kualitas lembaga dalam menyelenggarakan program terlaksana dengan optimal (Nuryanto & Irmade, 2019).

Optimalisasi kualitas pada suatu lembaga pendidikan formal melalui evaluasi diri untuk terus meningkatkan kelebihan yang dimiliki dan meminimalisir kekurangan yang ada untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu tujuan dilaksanakan akreditasi (Pramessti, 2018).

Adapun pendampingan yang dilakukan pada kegiatan ini diawali dengan pembuatan dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan khusus yang meliputi surat permohonan pengajuan akreditasi oleh satuan yang diakreditasi, izin operasinal lembaga pendidikan, jumlah peserta didik, dan sertifikat kompetensi guru serta kurikulum satuan untuk pengajuan akreditasi yang kemudian diupload pada web yang telah ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF (Suwanto & Roestam, 2017). Dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus dibuat oleh lembaga sebelum menyediakan dokumen-dokumen lain untuk persiapan kelayakan akreditasi. Guru-guru terlihat antusias membuat dan melengkapi dokumen-dokumen yang telah di sampaikan.

Setelah melakukan pendampingan terkait dengan pembuatan dan penyediaan dokumen terkait dengan persyaratan khusus, dilanjutkan dengan penyediaan ataupun pemilahan dokumen-dokumen sesuai Standar Nasional Pendidikan serta kebutuhan persyaratan umum untuk persiapan kelayakan akreditasi lembaga pendidikan. Guru-guru diberikan tugas perstandar untuk melengkapi dan memilah dokumen yang diperlukan.

Edukasi diberikan kepada guru-guru terkait dengan tata cara pembuatan dan penyediaan dokumen-dokumen pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran meliputi Prota, Prosem, RPPM dan RPPH. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi daftar kehadiran, desain dan model pelaksanaan kegiatan pembelajaran sampai pada penilaian yang dilakukan sesuai dengan anak usia dini yang dilayani sesuai dengan tahapan perkembangannya. Penilaian pada perkembangan anak dilakukan setiap hari, setiap minggu kemudian direkap setiap bulan untuk menjadi acuan penilaian perkembangan untuk laporan semester.

Berbagai masukan dan edukasi disampaikan kepada kepala lembaga pendidikan dan yayasan terkait dengan dokumen-dokumen penyelenggaraan satuan pendidikan berdasar pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, berbagai dokumen yang harus dievaluasi seperti dokumen kurikulum yang menjadi pedoman pelaksanaan program

pembelajaran pada lembaga pendidikan. Dokumen-dokumen lain yang harus disiapkan kepala lembaga pendidikan misalnya dokumen supervisi kepada guru-guru dan dokumen-dokumen lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



**Gambar 2.** Foto pendampingan dan edukasi kepada guru-guru terkait dengan dokumen kelayakan akreditasi berdasar pada SNP

### 3.4 Evaluasi Kegiatan dan Tindak Lanjut

Pada akhir kegiatan, setelah dilakukan evaluasi diri internal terkait dokumen-dokumen lembaga maka dapat diidentifikasi factor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses pembuatan dokumen sesuai dengan kelayakan akreditasi sebagaimana berdasar pada Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan tersebut menjadi penting agar dapat diketahui secara tepat agar dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Faktor pendukung dan factor penghambat yang ditemukan selama proses pelaksanaan pengabdian akan berguna kepada berbagai pihak dalam kegiatan yang serupa dengan hasil yang serupa (Herianto et al., 2019).

### 4. Kesimpulan

Kegiatan PKM ini adalah Pendampingan eksternal RA Baitul Hidayah dalam mempersiapkan kelayakan akreditasi. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam empat tahapan dimana tahapan pertama komunikasi dengan pimpinan selanjutnya komunikasi dengan pihak-pihak lembaga PAUD, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan edukasi kepada guru terkait dengan dokumen-dokumen persiapan akreditasi serta evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh dosen mahasiswa PG PAUD UM Buton. Respon yang sangat memuaskan ditunjukkan oleh guru selama pelaksanaan PKM ini. Guru lebih bersemangat dan antusias untuk membuat dokumen-dokumen terkait dengan perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Kegiatan ini membantu para guru agar lebih berinovasi disertai dasar yang jelas dalam membuat dokumen-dokumen kelembagaan dan layanan terkait dengan penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan.

Kegiatan ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada guru tentang dokumen-dokumen pembelajaran berdasarkan SNP khususnya pembelajaran untuk Anak Usia Dini dalam pemberian layanan yang berkualitas. Akan tetapi untuk keberhasilan yang berkesinambungan pengabdian ini, di masa yang akan datang perlu dilakukan pendampingan terus menerus bagi guru-guru TK/RA atau pendidikan non formal lainnya terkait dengan dokumen-dokumen maupun standar-standar pendidikan terkait dengan kelayakan akreditasi yang lebih update sehingga mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan menjadi lebih baik.

**Daftar Pustaka**

- Herianto, E., Rispawati, R., Dahlan, D., & Alqardi, B. (2019). Pelatihan dan Pendampingan Tentang Persiapan Akreditasi dan Dampaknya Bagi Kesiapannya dalam Menyongsong Akreditasi. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4).
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indrawan, I. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi PAUD. *Mitra Ash-Shibyan*, 3(01), 46–54.
- Lt, G. D., & Fatmawati, M. J. R. (2006). *Badan Standar Nasional Pendidikan*.
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga Paud di IGTKI Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 2(02), 86–93.
- Pramesti, S. I. (2018). *Identification of Accreditation Assessment System in Nonformal Education*. 1(1).
- Raya, M. K. F. (2018). Komunikasi Manajerial dalam Pendidikan. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 60–74.
- Sermisirikarnjana, P., Kiddee, K., & Pupat, P. (2017). *An Integrated Science Process Skills Needs Assessment Analysis for Thai Vocational Students and Teachers*. 18(2), 1–25.
- Suwarto, S., & Roestam, R. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Akreditasi Berbasis Web pada Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(3), 661–674.
- Wahyuni, I. W., & Putra, A. A. (2020). Pendampingan Penyusunan Administrasi PAUD Sekato Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(1), 125–132.
- Wijoyo, H. (2020). Socialization of The Accreditation Assessment System (SISPENA) of The National Accreditation Board for Early Childhood Education (PAUD) and Non Formal Education (PNF) in Bengkalis, Riau Province. *Jurnal Humanities Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 103–111.
- Yudiawan, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi dan Pendampingan Program Akreditasi terhadap Motivasi Akreditasi Pengelola PAUD di Provinsi Papua Barat. *PRATAMA WIDYA: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 132–136.